

PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM KEPASTIAN PROSES PENGESAHAN BADAN HUKUM

DEDY AHMAD WIRYADI

ABSTRACT

SABH (Legal Entity Administrative System) is used to request the settlement of the legal entity of a corporation electronically by using internet online. A Notary as a public official not only serves people who need his service but also because of law. The Notary's responsibility in the establishment of a corporation cannot be separated from his role in the process of the validation of the establishment of the corporation. A Notary's knowledge should be in line with technological advancement in using SABH. SABH is used to replace inefficient manual system in the procedure of validation of the establishment of a Corporation; but, for many reasons, manual system is still in effect besides SABH which is not in line with the previous regulation which states that manual system is not in effect. By using SABH, it is expected that there will be no obstacle any more in the practice of validating a corporation to become legal entity since it has good control system so that human error can be decreased because all processes operate automatically.

***Keywords : Notary, Validation of Corporation, Legal Entity
Administrative System***

I. Pendahuluan

Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH (dulu disebut Sisminbakum) adalah jenis pelayanan jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat dunia usaha dalam proses pengesahan badan hukum PT, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar PT, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT dan perubahan data PT, serta pemberitahuan informasi lainnya secara elektronik (melalui jaringan komputer dan internet), yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kementerian Hukum dan HAM RI.¹

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada awalnya dikenal dengan sebutan SISMINBAKUM yang merupakan suatu sistem *online* yang diciptakan

¹ Iswi Hariyani, R.Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Yustisia Serfiyani., *Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), Cetakan Pertama, hal. 13.

oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk mempercepat proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, persetujuan anggaran dasar maupun pelaporan anggaran dan atau data Perseroan Terbatas. *Transformasi* SISMINBAKUM menjadi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) merupakan bentuk optimalisasi pelayanan hukum oleh pemerintah kepada masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan jejaring teknologi informasi secara *online*. Dimana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terus bergerak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat”²

Secara substansi, proses dan permohonan pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data Perseroan sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 adalah sama. Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 mengatur tata cara yang cenderung lebih efektif bila dibandingkan dengan tata cara sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 01 Tahun 2011.

Penerapan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum/SABH) adalah prosedur permohonan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan menggunakan komputer atau dengan fasilitas *home page / website*. Anggota atau pelanggan sisminbakum adalah Notaris, Konsultan hukum dan pihak lain yang telah memiliki *username* dan kode *password* tertentu serta telah memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ditjen AHU.³

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 tahun 2014, untuk selanjutnya disebut Permenkumham nomor 4 tahun 2014 mengatur bahwa persetujuan maupun penolakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia disampaikan secara elektronik kepada pemohon. Untuk itu, Notaris dapat mencetak sendiri keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut. Dalam hal pemohon berkewajiban

² SABH-NG Menjawab Tantangan Zaman, *Diapresiasi Banyak Negara*, Majalah Renvoi Nomor 7/79, Desember Th 07/2009.

³ Iswi Hariyani, R.Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Yustisia Serfiyani, *Op.cit.*, hal. 164-165.

untuk menyampaikan dokumen pendukung dalam mengajukan suatu permohonan, maka si pemohon diwajibkan untuk menyampaikan surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan bahwa dokumen pendukung telah lengkap. Namun demikian, dokumen-dokumen pendukung tersebut dalam bentuk fisik akan disimpan oleh Notaris. Hal ini berbeda dengan Permenkumham Nomor 01 Tahun 2011, yang mewajibkan pemohon untuk menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dengan dokumen pendukung.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Mekanisme Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) terhadap proses Pendirian Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris terhadap masalah yang timbul terkait Pengesahan Perseroan Terbatas melalui SABH ?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui Mekanisme Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) terhadap proses Pendirian Perseroan Terbatas .
2. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Notaris terhadap masalah yang timbul terkait Pengesahan Perseroan Terbatas melalui Sistem (SABH).

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer.⁴

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 tahun 2014.

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 53

b. Bahan hukum sekunder.⁵

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Peranan dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Kepastian Pengesahan Badan Hukum

c. Bahan hukum tertier.⁶

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan teknik studi pustaka, sedangkan alat pengumpulan data adalah studi dokumen, studi dokumen dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis literatur buku-buku, peraturan peraturan perundang-undangan, *website* Ditjen AHU, wawancara lisan, tulisan ataupun menggunakan media telepon dengan Notaris yang berkaitan dengan penulisan tesis.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas telah memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum sebagaimana telah diatur dalam UUPT. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:⁷

- a. Memiliki pengurus dan organisasi teratur.
- b. Dapat melakukan perbuatan hukum (*recht handeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechts betrekking*), termasuk dalam hal ini dapat digugat atau menggugat didepan pengadilan.
- c. Mempunyai harta kekayaan sendiri
- d. Mempunyai hak dan kewajiban.
- e. Memiliki tujuan sendiri

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 83.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya pendirian perseroan sah sebagai badan hukum, terdiri atas:⁸

1. Harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih
2. Pendirian Berbentuk Akta Notaris
3. Dibuat dalam Bahasa Indonesia
4. Setiap pendiri wajib mengambil saham
5. Mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia

Menurut Pasal 7 ayat (6) *jo.* pasal 9 UUPT 1995 atau pasal 7 ayat (4) *jo.* Pasal 9 (1) UUPT 2007, menyatakan bahwa Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.⁹

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang merupakan produk hukum berbasis internet yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam pelaksanaannya tunduk pada aturan-aturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai dasar hukum diselenggarakannya sistem elektronik tersebut. Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada dasarnya harus memiliki *sinkronisasi* dengan aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sistem Administrasi Badan Hukum menurut Peraturan Menteri tersebut di atas diberlakukan pada:

- a. Pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas (diatur dalam Bab II Pasal 2 - Pasal 17)
- b. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (diatur dalam Bab III Pasal 18 - Pasal 23)
- c. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. (diatur dalam Bab IV Pasal 24 - Pasal 30)

Untuk melakukan pemesanan nama perseroan, proses pendirian dan pengesahan badan hukum dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum

⁸ M yahya harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cetakan Ketiga, hal. 161

⁹ Mulhadi, *Op.cit.*, hal. 83.

di situs yang telah di sediakan oleh Ditjen AHU.¹⁰

Sebelum memulai pembuatan Akta Pendirian, Notaris harus lebih dahulu mengecek nama perseroan yang akan dipakai di dalam website “<http://www.ahu.go.id>”, dimana hal tersebut melalui proses yang harus dilakukan dalam SABH yang di sediakan oleh Ditjen AHU sebagai penyelenggara layanannya.

Tiap Notaris yang akan mengakses SABH haruslah mendaftarkan dirinya ke pihak penyelenggara layanan yang perwakilannya bertempat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya Notaris diberikan suatu kata kunci atau *password* yang terdiri dari rangkaian huruf atau angka yang dapat dirubah sesuai dengan keinginan Notaris yang bersangkutan. Selain itu Notaris juga dilengkapi dengan *user ID* atau nama dari pengguna , biasanya adalah nama dari Notaris itu sendiri, untuk digunakan dalam membuka atau memulai pengaksesan di dalam *website* SABH yang beralamat di <http://www.ahu.go.id>.

Dengan demikian yang dapat melakukan permohonan pengesahan terhadap akta-akta Notaris hanyalah Notaris itu sendiri, dan tidak dapat lagi biro jasa atau orang lain dan bahkan orang dalam perusahaan turut mengurus langsung dalam proses pengesahan tersebut. Tetapi dalam hal pemesanan nama Perusahaan saat ini sudah dapat dilakukan secara online baik itu oleh masyarakat umum maupun oleh Notaris dengan syarat dan ketentuan yang di tetapkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

Alur Proses Pengesahan PT Melalui SABH Di Website Ditjen AHU :

- a. Untuk melakukan pemesanan nama PT terlebih dahulu Pemohon masuk ke halaman muka situs “www.ahu.go.id “ Masuk ke bagian “SIMPADHU” untuk melakukan pemesanan voucher pemesanan nama perseroan. (batas pembayaran hanya 2 hari dari tanggal pemesanan voucher, apabila telah lewat dari 2 hari, maka nomor voucher tidak dapat digunakan).
- b. Print voucher Pesan nama (senilai Rp 200.000), kemudian bawa pada bank BNI selaku bank yang ditunjuk untuk melakukan pembelian voucher PT *online*.

¹⁰ Panduan Aplikasi Perseroan Terbatas
http://panduan.ahu.web.id/doku.php?id=perseroan_terbatas di akses tanggal 30 mei 2015

- c. Setelah itu Pemohon kembali masuk ke situs “www.ahu.go.id “
Masuk ke bagian “PERSEROAN TERBATAS” dan akan muncul tampilan “PERSEROAN”. kemudian lakukan proses pemesanan nama dan masukkan kode voucher yang telah dibayar sebelumnya dan nama perusahaan yang di inginkan. Maka akan muncul tampilan pernyataan bahwa nama yang di pesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Lalu akan keluar menu diterima atau tidaknya pemesanan nama (diakibatkan telah ada nama yang sama),bila ada nama yang sama maka harus diganti.
- d. Bila pemesanan nama diterima dan mendapat persetujuan maka kemudian bisa dilanjut pada proses pendirian PT untuk mendapatkan pengesahannya.
- e. Pemohon kembali Masuk ke masuk ke halaman muka situs dan Masuk ke bagian “SIMPADHU” untuk melakukan pemesanan voucher PNBPN untuk pengesahan PT dan voucher PNBPN BN/TBN. (batas pembayaran hanya 2 hari dari tanggal pemesanan voucher, apabila telah lewat dari 2 hari, maka nomor voucher tidak dapat digunakan).
- f. Tetapi kalau hanya untuk perubahan PT terhadap data perseroan maka pembayaran PNBPN tidak ada.
- g. Kemudian voucher di print dan lakukan pembayaran di BNI sebesar PNBPN pengesahan senilai Rp 1.000.000 dan PNBPN BN / TBN senilai Rp 580.000.
- h. Setelah itu kembali masuk ke halaman muka situs Pendirian PT dengan mencantumkan kode pembayaran setelah itu tampilan untuk pengisian data akan keluar dan kemudian melakukan pengisian data perseroan.
- i. Kemudian bila semua data yang dimasukkan sudah terpenuhi maka akan muncul “Surat Pernyataan Elektronik oleh Notaris tentang kebenaran data Perseroan Terbatas”. Apabila pemohon sudah menyatakan kebenaran data tersebut maka akan muncul “Pratinjau Pengisian Data Perseroan” yang gunanya untuk mengetahui secara

lebih dini pengkoreksian terhadap data yang telah dimasukkan tersebut.

- j. Kemudian pemohon sudah menyatakan kebenaran data tersebut maka akan muncul “Pernyataan Tidak Keberatan oleh Menteri” dalam hal permohonan pengesahan perusahaan tersebut.
- k. Setelah selesai baru SK pengesahan keluar dan bisa di cetak.
- l. Lembar Negara berupa Tambahan Berita Negara bisa dicetak jika kita telah mengirim kan dokumen berupa *softcopy* ke “email.btbncn.co.id” dan *hardcopy* ke PNRI (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia) (Gudang Ditjen AHU) dengan Alamat Jalan Percetakan Negara Nomor 21, Jakarta Pusat, untuk keperluan penerbitan Berita Negara dan Tambahan Berita Negara serta keperluan pengarsipan Ditjen AHU. yang terdiri dari:
 - a. Akta pendirian PT (dengan tidak dicantumkan materai dan tanda tangan Notaris)
 - b. Lembar pembayaran TBN
 - c. Fotocopi Surat Keputusan Pengesahan badan Hukum oleh Menteri.
 - d. Surat pernyataan dari Notaris telah dilakukan pengiriman akta perusahaan dalam bentuk *softcopy* dan dibubuhi materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah)
 - e. Setelah itu menunggu lembar berita Negara di kirim oleh Negara PNRI.

Tanggung jawab Notaris terhadap pendirian Perseroan Terbatas dimulai dari adanya ketentuan Perseroan Terbatas dibuat dengan akta Notaris. Pasal 7 ayat (1) UUPT nomor 40 tahun 2007 menetapkan bahwa perseroan terdiri oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam Pasal 1868 ditentukan sebagai berikut:

“Akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum,yang berwenang berbuat demikian, dimana akta itu dibuat”

Tentang kekuatan pembuktian sebagai akte otentik ditentukan dalam Pasal 1870 KUHPerdara:

“Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari pada mereka, suatu alat bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.

Untuk mengetahui kaitan pejabat umum dan akta otentik tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengenai siapa yang dimaksud dengan Notaris, sebagai berikut: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Lumban Tobing menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, apabila terdapat alasan sebagai berikut: ¹¹

1. Di dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Peraturan Jabatan Notaris (sekarang Undang undang Jabatan Notaris),
2. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuknya dibatalkan dimuka pengadilan atau dianggap hanya berlaku sebagai akta yang dibuat di bawahtangan,
3. Dengan segala hal, dimana menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1367 KUHPerdara terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian, artinya semua hal-hal tersebut harus dilalui pembuktian seimbang.

Notaris juga bertanggung jawab pada saat dimulai pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dihadapan Notaris yang memuat diantaranya tentang perumusan maksud dan tujuan perseroan, karena Notaris dituntut untuk seteliti mungkin mengenai hal-hal yang termuat dalam Akta Pendirian tersebut.

Perumusan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas adalah sejalan dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 2 UUPT, yaitu kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi

¹¹ GHS. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: PT. Erlangga, 1996), Cet. 3, hal. 324.

bahwa dalam Anggaran Dasar harus secara tegas ditentukan apa kegiatan Perseroan Terbatas yang baru didirikan tersebut.

Tanggung jawab Notaris dalam hal pengesahan pendirian Perseroan Terbatas tidak lepas dari peranan Notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas tersebut. Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta Perseroan Terbatas, apabila terjadi kesalahan dalam pendirian Perseroan Terbatas, dapat dilihat dari dua segi, yaitu kesalahan dalam pembuatan akta pendirian dan kesalahan dalam melakukan prosedur pengesahan pendirian Perseroan Terbatas. Dalam hal ini maka tanggung jawab tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab Notaris pada akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya kesalahan dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, dimana dalam hal kesalahan tersebut, dibagi menjadi kesalahan karena adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kesalahan dalam hal kesesuaian data;

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris, seringkali kewajiban yang diberikan kepada Notaris tersebut tidak sepenuhnya menghasilkan sesuatu yang baik, karena rupanya hal tersebut seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang beritikad buruk untuk kepentingan mereka sendiri dan merugikan pihak-pihak lain. Notaris tidak sepenuhnya dapat melihat apakah klien yang datang kepadanya memiliki itikad baik atau malah sebaliknya, sehingga seringkali Notaris terjebak dalam situasi dimana klien yang bersangkutan ternyata memiliki itikad buruk.

Demikian halnya dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, kondisi yang seringkali terjadi, bahwa para klien yang beritikad buruk tersebut memalsukan data-data yang dibawa kepada Notaris yang bersangkutan, selain itu adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri yang berkaitan penyertaan modal serta susunan saham perseroan sebelum perseroan didirikan yang ternyata melanggar hukum. Hambatan tersebut menyangkut pada tanggung jawab Notaris tetapi bukan merupakan hambatan yang berhubungan dengan kinerja SABH dalam proses pengesahan Perseroan Terbatas.¹²

¹² Wawancara dengan Notaris Wahdini Syafrina tanggal 2 juni 2015

Dapat dilihat bahwa pembatasan mengenai tanggung jawab antara Notaris dan Menteri sebenarnya sudah dikonsepsikan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 dimana Pemohon dalam hal ini Notaris wajib mengisi “Surat Pernyataan Secara Elektronik” yang menyatakan Format Pendirian Perseroan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap Format Pendirian Perseroan dan keterangan tersebut.¹³

Hal ini berarti Permohonan tersebut sudah memenuhi syarat dan tidak melanggar berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku dan juga Notaris siap menerima segala bentuk sanksi berupa sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ini artinya Notaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran terhadap materi yang menyangkut data perusahaan, dimana nantinya segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan tentunya mempunyai akibat hukum.

Namun, terhadap pertanggungjawaban itu sendiri undang-undang perusahaan terbatas nomor 40 tahun 2007 atau pun Permenkumham nomor 4 tahun 2014 tidak mengatur konsekuensi yang mengikutinya. Tetapi aturan KUHPperdata dan KUHPpidana tentunya dapat dikenakan sebagai sanksi yang dapat memberatkan Notaris.

Untuk mengetahui sampai sejauh mana tanggung jawab Notaris, apabila terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pendiri perseroan yang beritikad buruk, maka jika dilihat dari aspek undang-undang yang dijadikan sebagai landasan, UUPT hanya menetapkan bahwa pendirian perseroan dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) UUPT) ditetapkan bahwa semua perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal serta susunan saham perseroan yang dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan didirikan harus dicantumkan dalam Akta Pendirian. Apabila perbuatan hukum pendiri tidak dicantumkan di dalam akta, maka perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban

¹³ Pasal 14 ayat 1 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014

bagi perseroan (Pasal 12 ayat (4) UUPT).

Berdasarkan ketentuan di atas, maka secara yuridis perbuatan pendiri perseroan yang tidak dinyatakan dalam akta Notaris, bukan menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan. Notaris sebagai pejabat negara tidak mempunyai kewenangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pendiri Perseroan Terbatas yang melanggar hukum, keterbatasan Notaris sebagai Pejabat Negara hanya sebagai Pejabat Negara sebagai pembuat akta otentik.

Tanggung jawab pendiri perseroan dan Notaris dalam mendirikan Perseroan Terbatas didasarkan pada ketentuan UUPT, yang dapat dilihat dari bunyi akta pendirian, ketentuan mengenai standar akta juga memberikan batas kewenangan Notaris sebagai pejabat negara untuk membuat akta otentik, sehingga tanggung jawab Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas dalam pembuatan akta otentik, sedangkan tanggung jawab pendiri perseroan adalah menyetorkan modal perseroan dan melakukan perbuatan hukum sebagaimana dalam akta. Perbuatan hukum pendiri yang tidak jelas disebutkan dalam akta menjadi tanggung jawab pribadi, begitu juga bagi pendiri perseroan Terbatas perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan atau pendiri perseroan dimaksudkan dalam akta/anggaran dasar perseroan.¹⁴

Berkaitan dengan “Surat Pernyataan Elektronik” oleh Notaris pada SABH, memungkinkan Notaris dapat terjerat dari masalah hukum, dimana kemungkinan klien atau pendiri yang beritikad buruk memalsukan data-data yang dibawa kepada Notaris. Sementara dengan menyetujui pernyataan tersebut Notaris berarti menjamin kebenaran informasi data yang dimasukkan pada proses tersebut.

Untuk terhindar dari masalah tersebut maka yang harus dilakukan Notaris untuk mengetahui dan memastikan keaslian data yang diberikan kepadanya adalah sewaktu pembuatan akta pendirian perusahaan, maka data-data yang diperlukan harus dilengkapi dan bila diperlukan dokumen aslinya harus diperlihatkan kepada Notaris. Kemudian dalam klausula akta pendirian tersebut ditegaskan bahwa syarat-syarat yang telah dilengkapi tersebut adalah benar adanya dan sesuai dengan aslinya, dan apabila di kemudian hari ditemukan permasalahan

¹⁴ Wawancara dengan Notaris Rahmat Nauli Siregar tanggal 5 Agustus 2015

akibat tidak benarnya data yang di berikan pendiri tersebut maka segala sanksi yang berlaku menjadi tanggung jawab pendiri tersebut.¹⁵

Notaris tidak bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pendiri perseroan, sebab semua perbuatan hukum dari pendiri perseroan sudah termasuk di dalam akta / Anggaran Dasar perseroan, sehingga perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pendiri akan berisiko secara pribadi pada pendiri perseroan, sepanjang perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan tidak tercantum dengan jelas di dalam akta pendirian/Anggaran Dasar perseroan.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa Notaris sebagai pejabat umum titik beratnya adalah tanggung jawab untuk memberikan dan menjamin adanya kepastian hukum. Notaris bisa mendapat gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan dalam pembuatan sesuatu akta, sehingga oleh karenanya Notaris selalu berusaha dalam koridor asas kehati-hatian dalam pembuatan suatu akta. Apakah kelak akta yang telah dibuatnya berpotensi menimbulkan masalah diantara para pihak sehingga berujung salah satu pihak yang merasa dirugikan membuat pengaduan ke pihak Kepolisian, Kejaksaan maupun sampai ke Pengadilan.¹⁶

Untuk itu dapat dalam pelaksanaan proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, sebaiknya para pihak yang terlibat selalu memperhatikan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan diiringi dengan adanya itikad baik, sehingga sistem yang berjalan dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang ada.¹⁷

Permasalahan hukum yang paling penting yang harus diperhatikan oleh Notaris sebagai satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta pendirian perseroan terbatas dan Menteri Hukum dan HAM RI sebagai pejabat negara yang berwenang untuk mengeluarkan surat keputusan pemberian status badan hukum bagi perseroan terbatas, adalah ketentuan Pasal 10 ayat (1) jo ayat (2) UUPT yang pada prinsipnya telah memberikan batasan waktu permohonan pengesahan badan hukum perseroan terbatas dalam jangka waktu 60 (enam puluh

¹⁵ Wawancara dengan Notaris Rahmat Nauli Siregar tanggal 5 Agustus 2015

¹⁶ Wawancara dengan Notaris Rahmat Nauli Siregar tanggal 5 Agustus 2015

¹⁷ Wawancara dengan Notaris Wahdini Syafrina tanggal 2 juni 2015

hari) sejak ditandatanganinya akta pendirian dengan ancaman batal demi hukum terhadap akta tersebut apabila ketentuan Pasal 10 ayat (1) tidak terpenuhi.

Apabila akta pendirian perusahaan di batalkan karena keterlambatan, dimana dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akta pendirian di buat oleh Notaris belum mendapatkan pengesahan oleh Menteri, maka hal tersebut tentulah karena kesalahan Notaris. Notaris telah lalai untuk memenuhi kewajiban Pasal 10 ayat (1) tersebut. Karena sewaktu dalam pembuatan akta pendirian seharusnya data-data dan dokumen yang di perlukan berkaitan dengan proses pengisian data untuk pengesahan perseroan menjadi badan hukum oleh Menteri pada SABH, antara lain adalah data para pendiri lainnya, surat keterangan domisili, surat pernyataan besaran jumlah modal dan lain sebagainya harus sudah dilengkapi oleh pendiri perseroan . Setelah itu barulah Notaris dapat melakukan proses untuk pengesahan badan hukum pada SABH. Akibat kesalahan Notaris tersebut maka biaya-biaya yang timbul akibat keterlambatan tersebut, mulai dari biaya pemesanan nama, pembuatan akta pendirian dan biaya PNPB untuk pengesahan badan hukum bahkan apabila diharuskan pembuatan ulang proses tersebut akan menjadi tanggung jawab Notaris. Hal itu dapat terjadi karena jika Notaris telah menerima kuasa untuk pendirian dan pengesahan badan hukum berarti Notaris sudah menyanggupi dalam menyelesaikan proses tersebut.¹⁸

Namun ada juga permasalahan dimana keterlambatan tersebut akibat klien atau pendiri persero yang menunda-nunda dalam melengkapi berkas atau ketidakhadiran salah satu pendiri ,dan juga tidak dilengkapi surat kuasa untuk diwakili oleh orang lain sebagai syarat dalam proses pembuatan akta pendirian dan pengesahan badan hukum. Keterlambatan tersebut hanya mengakibatkan daluarsa nya jangka waktu pemakaian nama yang telah di pesan yakni 60 (enam puluh) hari.Karena Notaris seharusnya tidak melanjutkan ke proses pembuatan akta pendirian dan pengesahan badan hukum apabila semua syarat yang di perlukan tidak lengkap. Notaris harus tegas dalam hal tersebut jika tidak maka keterlambatan tersebut tentunya menjadi tanggungjawab Notaris.¹⁹

Dalam hal terjadinya gangguan terhadap Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang berakibat terjadinya keterlambatan dalam mengajukan permohonan pengesahan badan hukum perseroan terbatas sehingga ketentuan Pasal 10 ayat (1) tidak terpenuhi, maka hal tersebut tidaklah menjadi

¹⁸ Wawancara dengan Notaris Rahmat Nauli Siregar tanggal 5 Agustus 2015

¹⁹ Wawancara dengan Notaris Rahmat Nauli Siregar tanggal 5 Agustus 2015

tanggungjawab dari Notaris yang membuat akta pendirian tersebut, oleh karena hal tersebut terjadi diluar jangkauan kemampuan si Notaris.

Menteri Hukum dan HAM RI yang harusnya bertanggungjawab secara penuh sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan SABH. Notaris dalam kondisi ini harus dibebaskan dari segala bentuk pertanggungjawaban. Notaris hanya dapat diminta pertanggungjawabannya apabila Notaris dalam menjalankan jabatannya merugikan hak-hak dari para pihak yang berkepentingan. Apabila hal tersebut terjadi maka Notaris dapat dikenakan sanksi.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, ternyata proses pengesahan perseroan terbatas melalui SABH tidak selalu bermasalah pada sistem tersebut. Permasalahan juga bisa terjadi pada pihak Notaris maupun pada pihak klien sebagai pendiri Perseroan Terbatas. Antara ketiganya saling terkait erat, apabila ada permasalahan disalah satu pihak maka akan berdampak pada proses pengesahan perseroan terbatas melalui SABH secara keseluruhan.

Oleh karena itu Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut.

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum, pada pendirian PT melalui mekanisme SABH dimulai dengan dilakukannya permohonan pemesanan nama perseroan dan ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pendirian PT. Berdasarkan kuasa yang diberikan oleh para pendiri kepada Notaris sebagai pemohon, pemohon melakukan pembayaran PNPB pengesahan dan BN/TBN. Selanjutnya, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung dari tanggal pembuatan akta, Notaris melakukan pengisian data PT dan menyampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan format SABH secara elektronik. Apabila pengisian data PT dilakukan dengan lengkap dan benar, maka seketika itu juga akan dikeluarkan Surat Pernyataan Elektronik tentang Kebenaran Data Perseroan Terbatas. Setelah itu, akan dikeluarkan Pernyataan Tidak Keberatan oleh Menteri secara *online* dan dilanjutkan penerbitan SK

pengesahan badan hukum oleh Menteri untuk selanjutnya dicetak sendiri oleh pemohon.

2. Notaris tidak selalu dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila timbul masalah-masalah pada proses pendirian PT dan pengesahan PT melalui SABH. Apabila para pendiri tidak melengkapi berkas pendukung setelah permohonan nama PT disetujui sehingga mengakibatkan kegagalan pendirian PT oleh karena jangka waktu penggunaan nama PT itu *expired*, maka Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Namun, apabila Notaris gagal melakukan pemrosesan pendirian dan pengesahan PT melalui SABH setelah para pendiri telah melengkapi semua berkas pendukung yang dibutuhkan untuk pembuatan akta dan proses pengesahan PT, maka Notaris bertanggung jawab secara penuh atas masalah-masalah yang timbul daripadanya, kecuali masalah-masalah tersebut timbul akibat gangguan jaringan atau sistem SABH itu sendiri.

B. Saran

1. Diharapkan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) melakukan peningkatan dalam pelayanan SABH. Menyederhanakan prosedur dan persyaratan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas. Dan lebih di mudahkan dalam pengajuan pengkoreksian data perseroan yang telah terlanjur di sahkan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia. Dan juga dalam hal peningkatan penyebaran jaringan internet merata di semua daerah di Indonesia dimana hal tersebut membantu Notaris yang ada untuk memudahkan dalam proses pelaksanaan SABH. Kemudian mengenai pengamanan SABH yang menggunakan jaringan internet agar dijaga dan ditingkatkan bagaimana agar *hacker* tidak bisa masuk. Kepada para Notaris diharapkan agar lebih murah dalam memberikan biaya pembuatan Perusahaan kepada para pihak yang ingin mendirikan Perusahaan, dikarenakan biaya pada SABH lebih murah dari pada sistem yang sebelumnya.
2. Dengan adanya inovasi dan kemudahan terhadap proses pengesahan badan hukum perseroan, persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan diharapkan dapat meningkatkan iklim berusaha dan pembangunan

ekonomi di Indonesia. Kepada Notaris agar lebih teliti dan hati-hati sebelum membuat Akta Perseroan Terbatas, Notaris harus dapat mengetahui dan melihat keaslian data data-data Perseroan dalam dalam klausula Akta Pendirian tersebut di tegaskan bahwa syarat-syarat yang telah dilengkapi pendiri benar adanya dan sesuai dengan aslinya dan siap menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan permasalahan berkaitan hal tersebut. Dalam proses pembuatan akta pendirian perusahaan dan proses pengesahan badan hukum, hal-hal mengenai Teknis berkaitan mengenai waktu, tahap dan biaya-biaya yang diperlukan dalam penyelesaian proses tersebut sebaiknya dijelaskan Notaris dari awal kepada pendiri persero sewaktu Notaris menerima kuasa untuk pendirian dan pengesahan badan hukum, agar hambatan dan keterlambatan yang mungkin terjadi dapat di hindari. Bila ada pihak yang dirugikan pada akibat dari perbuatan hukum Perseroan Terbatas tersebut bukan tidak mungkin Notaris dapat di minta pertanggung jawaban secara Administrasi, Perdata dan bahkan Pidana.

V. Daftar Pustaka

- Harahap, M. Yahya, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika), Cetakan Ketiga.
- Hariyani, Iswi, Purnomo, R. Serfianto Dibyo dan Serfiyanti, Cita Yustisia, 2011, *Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia), Cetakan Pertama.
- Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia)
- Tobing, GHS. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3. (Jakarta: PT. Erlangga, 1996).
- SABH-NG Menjawab Tantangan Zaman, Diapresiasi Banyak Negara*, Majalah Renvoi Nomor 7/79, Desember Th 07/2009.
- Panduan Aplikasi Perseroan Terbatas
http://panduan.ahu.web.id/doku.php?id=perseroan_terbatas di akses
 tanggal 30 mei 2015.